



# 2015, Pembangunan Jakarta Terhambat

**PENYELESAIAN** persoalan APBD DKI 2015 berlarut-larut. Kondisi demikian sama halnya dengan mengorbankan kepentingan masyarakat Jakarta. Pembangunan di ibukota selama setahun ke depan dipastikan terhambat. "Gagalnya mediasi antara Pemprov DKI dan DPRD yang difasilitasi Kemendagri semakin memperpanjang persoalan. Akibatnya tidak akan ada proyek infrastruktur atau pun lainnya yang bisa segera dikerjakan," ujar Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Indonesia Agus Pambagio kepada INDOPOS, kemarin (8/3).

Pemprov DKI dan DPRD DKI Jakarta, saran Agus, harus sama-sama menahan diri. Kalau pun sudah terlanjur melibatkan jalur hukum, yakni pelaporan ke KPK dan jalur politik melalui hak angket, sebaiknya biarkan berjalan sesuai mekanisme yang berlaku. "Yang utama adalah kekisruhan yang terjadi antara legislatif dan eksekutif ini harus segera diakhiri demi kepentingan warga Jakarta," tandas dia.

Menurut Agus, Kemendagri menjadi kunci untuk penyelesaian kekisruhan tersebut. Mendagri dibenarkan mengambil langkah tegas, semisal menetapkan APBD 2014 untuk pembangunan di 2015. "Secepatnya harus ada penyelesaian," kata dia.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Yenny Sucipto menerangkan, ada beberapa langkah yang harus ditempuh dalam memetakan kisruh antara Pemprov DKI dan dewan. Langkah tersebut setidaknya dapat mengatasi kisruh APBD 2015.

"Persoalan pembahasan ini menyangkut adanya dua versi RAPBD, yakni versi Pemprov DKI dan versi DPRD. Keduanya dianggap saling mengklaim kebenaran atas RAPBD masing-masing sehingga masalah ini tak kunjung usai," tutur Yenny. Dia mengungkapkan, hak ang-

ket yang diajukan oleh DPRD merupakan persoalan terpisah ■

Langkah tersebut memunculkan tahapan selanjutnya, yakni ketika Gubernur Ahok melaporkan DPRD ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait munculnya anggaran siluman dalam RAPBD yang diajukan DPRD.

Yenny menilai, serangkaian kejadian itu tidak bisa dipandang sebagai masalah yang berdiri sendiri. Perlu ada usaha untuk menghubungkan masalah tersebut sehingga dapat menjadi satu kesatuan. "Kedua belah pihak tidak bisa memisahkan hal penting ini. Pertama soal hak angket, kedua pembahasan RAPBD dan masalah hukum," kata dia.

Apabila dilihat dari pemulangan RAPBD DKI Jakarta dari Kementerian Dalam Negeri, Yenny mengatakan hal tersebut harus fokus pada pembahasan selanjutnya. Artinya, jika memang ada temuan penggelembungan RAPBD hingga Rp 12,1 triliun, maka gubernur atau DPRD harus membahasnya secara bersama. "Seharusnya duduk bersama buat dibahas. Keinginan kita agar kedua belah pihak sadar pada kepentingan terbaik bagi masyarakat," kata Yenny.

Sangat disayangkan, jika hasil mediasi yang dilakukan oleh Kemendagri bersama Pemprov DKI dan DPRD yang berujung ricuh. Mediasi tersebut malah menunjukkan komunikasi yang buruk antara eksekutif dan legislatif sehingga mediasi justru berakhir buntu.

Informasi yang diperoleh, sejumlah instansi pelayanan, seperti Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), sudah mulai kesulitan dalam menyelesaikan pembayaran listrik, telepon dan operasional lainnya. Jika terus dibiarkan, dikawatirkan berdampak pada pelayanan publik. (wok)